

2019

RENCANA KERJA (RENJA) Th. 2019

*Dinas Sosial
Kabupaten Magetan*



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat-Nya kami masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salah satu tugas yaitu Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 disusun sebagai implementasi tahapan kegiatan tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama 5 (lima) tahun, dimana Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 disusun dalam upaya memberikan arahan/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Magetan selama tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen yang memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena didalamnya memuat berbagai informasi, data, isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan kegiatan prioritas berdasarkan review / hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dalam Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini dengan harapan dalam pelaksanaannya nanti diberikan kelancaran dan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, kami berharap agar Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 ini dapat dijadikan paduan serta acuan bagi seluruh aparat di Dinas Sosial Kabupaten Magetan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dalam upaya pelayanan prima kepada masyarakat.

Magetan, 16 Juli 2019

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Magetan



SUCIPTO, SH. M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19660714 199403 1009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1 Review Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2016 dan 2017 serta perkiraan Capaian tahun 2018.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	24
2.3 Isu-isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	25
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2019.....	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	37
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	40
BAB IV PENUTUP	
4.1 Catatan Penting.....	43
4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	43
4.3 Rencana Tindak Lanjut.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan sosial merupakan sebuah masalah yang cara menyelesaikannya tidak cukup dengan penanganan sekali ataupun setahun – dua tahun. Penyelesaian masalah ini memerlukan penanganan yang berkali-kali dan dampak perubahannya akan dirasakan beberapa tahun setelahnya, berbeda dengan pembangunan fisik yang dampaknya bisa langsung dirasakan. Ini menjadi tantangan nyata dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial dewasa ini diwarnai adanya perubahan paradigma pembangunan yang bergeser ke arah desentralistik dalam suasana otonomi daerah yang memberikan peran lebih besar kepada daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaku utama pembangunan serta memberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun disatu sisi, pelaksanaan otonomi tidak sepenuhnya berjalan mulus dengan ditemuinya dampak negatif yang berakibat pada peningkatan kualitas persoalan dalam layanan kesejahteraan sosial, meningkatnya kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan dengan berbagai problematikanya, meningkatnya pengangguran seiring dengan semakin menyempitnya peluang kerja serta eksekusi lainnya.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial juga membutuhkan dukungan dan peran aktif masyarakat, baik perseorangan, keluarga, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, simultan, terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengatasi 7 (tujuh) fokus permasalahan sosial yakni Kemiskinan, Keterlantaran, Kecacatan, Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku, Keterpencilan, Korban Bencana serta Tindak Korban Kekerasan dan Pekerja Migran, baik yang bersifat primer maupun akibat/dampak non sosial.

Semangat Tat Twam Asi (Aku adalah Engkau dan Engkau Adalah Aku) telah menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial PMKS yang berorientasi pada proses memanusiakan manusia sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial secara mandiri bagi kesejahteraan hidupnya. Dengan terjadinya perubahan-perubahan di dalam kehidupan masyarakat maka pembangunan bidang kesejahteraan sosial perlu dirumuskan dan direncanakan dengan mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran program yang mendukung Terwujudnya Kesejahteraan Sosial.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan sertamengolah data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review / hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu dan berdasarkan Restra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD sertaselanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang stimulan degan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Renja SKPD merupakan penjabaran dan mempunyai hubungan yan selaras dengan

dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, RKA SKPD, KUA, PPAS dan RAPBD.

Selanjutnya Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2019 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan

- Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89)
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan.
 16. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan.
 17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Cara Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 56)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
2. Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
3. Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2018 Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah terkait dengan Urusan bidang Pembangunan Sosial Tahun 2019 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2019;
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan yang terukur.
5. Memberikan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Sosial Kabupaten

- Magetan dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

RenjaDinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang disusunnya Renja SKPD tahun 2019
Berisi pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra, Renja K/L, Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dengan SOTK dan kewenangan dan yang berkaitan langsung digunakan dasar dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional maupun lokal
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja
- 1.4 Sistematika penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASIPELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan 2017 dan perkiraan Capaian tahun 2018, dikaitkan dengan target capaian Renstra.
Mengacu Tabel T-C.29
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

NSPK (Norma, standar, Prosedur, Kriteria) dan SPM maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Mengacu Tabel-C.30

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Berisi sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan berisikan permasalahan dan hambatan, serta tantangan dan peluang dalam pelayanan tugas dan fungsi serta isu-isu strategis lainnya

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Mengacu Tabel T-C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para masyarakat, dan pengumpulan informasi dan pengamatan lapangan.

Mengacu Tabel T-C.32

BAB III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2 Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memberikan informasi program dan kegiatan tahun 2019, rencana, target capaian kinerja beserta pagu indikatifnya. Juga dicantumkan tanggal, nama Kepala Perangkat daerah dan stempel.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan hal-hal penting lainnya yang dianggap perlu, seperti kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut. Juga dicantumkan tanggal, nama Kepala Perangkat daerah dan stempel

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Review Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan 2017 serta Perkiraan Capaian Tahun 2018

Secara umum, target Indikator Kinerja Daerah pada Dinas Sosial dapat tercapai pada akhir tahun RPJMD, yaitu tahun 2018. Untuk capaian tahun 2018 ada satu indikator yang belum mencapai target, yaitu Cakupan PMKS yang memperoleh Pemberdayaan Sosial melalui KUBE atau kelompok Sosial Ekonomi sejenis.

Adapun realisasi program dan kegiatan dapat dijabarkan masing-masing sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengadaan Komputer/laptop dengan capaian kinerja terlaksananya terlaksananya pengadaan printer 2 unit dan scanner 1 unit.
 - b) Pemeliharaan rutin/berkala Taman Makam Pahlawan dengan capain kinerja terlaksananya pemeliharaan kebersihan dan keamanan Taman Makam Pahlawan Yudhonegoro.
2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin dengan capaian kinerja :
 - Pemberian Sembako untuk fakir miskin di sepanjang rute Napak Tilas Ngunut – Magetan dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Magetan sebanyak 480 paket.
 - Pemberian sembako untuk fakr miskin yang dianggap membutuhkan sebanyak 700 paket.
 - b) Penanaman Nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dengan capaian kinerja :
 - Pemberian sembako untuk fakir miskin di sekitar Monumen Soco dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila sebanyak 170 paket.
 - Pemberian Sembako untuk fakir miskin di sekitar makam leluhur sebanyak 430 paket dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Magetan.

- Pemberian transport untuk Veteran dalam rangka mengikuti HUT Kemerdekaan RI
 - c) Pemberdayaan Fakir Miskin dengan capaian kinerja :
 - Terlaksananya sosialisasi program pemberdayaan fakir miskin sebanyak 271 orang peserta
 - d) Pemberdayaan Program Keluarga Harapan dengan capaian kinerja:
 - Terlaksananya Rakor UPPKH
 - Terlaksananya monitoring penyaluran bantuan PKH
 - Pemberian bantuan transport bagi pednamping, operator dan Korkab PKH
3. Progam Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a) Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak dengan capaian kinerja :
 - Terlaksananya sosialisasi KDRT dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang
 - b) Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan capaian kinerja :
 - Terlaksananya sosialisasi HIV/AIDS dan penyalahgunaan NAPZA dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang
 - c) Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dengan capaian kinerja :
 - Terlaksananya pemantapan bagi anggota TAGANA dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang
 - Pemberian Sembako bagi korban aneka kejadian bencana sebanyak 400 paket sembako
 - Pengerahan Tagana dalam rangka penanganan bencana
 - Pengerahan Tagana ke luar daerah dalam rangka mengikuti kegiatan baik di tingkat Provinsi maupun Nasional
4. Progam Pembinaan Anak Terlantar.
Dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a) Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar dengan capaian kinerja :
 - Mengirim peserta pelatihan ke UPT PSRT dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang

- Mengirim peserta tetirah sebanyak 50 anak nakal ke UPT Panti Sosial Petirahan Anak Bima Sakti Malang
5. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.
Dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma dengan capaian kinerja :
- Terlaksananya pendataan ASODKB
 - Pengiriman cacat mampu latih ke panti sosial untuk mengikuti pelatihan ketrampilan sebanyak 6 orang
 - Terlaksananya bimbingan dan seleksi pemberdayaan ODK tubuh sebanyak 70 orang
 - Terlaksananya pelayanan untuk pemberian bantuan sosial bagi disabilitas intelektual sebanyak 65 orang
 - Terlaksananya bimbingan dan motivasi bagi wali cacat berat sebanyak 252 orang
6. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a) Pendampingan operasional bantuan langsung tunai untuk lanjut sosial dengan capaian kinerja :
- Terlaksananya bimbingan sosial bagi wali permanen penerima bantuan sosial sebanyak 100 orang
 - Terlaksananya updating data penerima ASLUT
7. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a) Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial dengan capaian kinerja :
- Penanganan hasil razia PMKS
 - Pemulangan Orang Terlantar ke daerah asal
 - Pengiriman gelandangan psykotik ke Rumah sakit Jiwa/Panti Sosial
 - Penanganan mayat terlantar
8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a) Peningkatan Jejaring Kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat dengan capaian kinerja :

- Terlaksananya pameran dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Magetan
 - Ekspose kegiatan di media massa
- b) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat dengan capaian kinerja :
- Terlaksananya pembinaan PSM dan TKSK sebanyak 65 orang PSM dan 18 orang TKSK
 - Verifikasi dan validasi data PBI JKN
 - Pengiriman Karang taruna dan Karang Wredha, TKSK, LKS dan relawan sosial ke luar daerah
- c) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial dengan capaian kinerja :
- Terlaksananya pembinaan kelembagaan Karang Wredha sebanyak 50 lembaga
 - Terlaksananya pembinaan kelembagaan LKSA sebanyak 50 lembaga
 - Terlaksananya pembinaan kelembagaan Karang Taruna sebanyak 50 lembaga
9. Progam Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a) Pelayanan Sunatan Masal dengan capaian kinerja :
- Terlaksananya sunatan masal dengan peserta sebanyak 180 anak dari keluarga miskin
10. Progam Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
Dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a) Survey Indek Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja :
- Terlaksananya Survey Indek Kepuasan Masyarakat sebanyak 1 kali dan penyusunan Laporan hasil survey
11. Progam Pembinaan Mental Spiritual
Dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a) Peningkatan kualitas pelayanan hibah kepada lembaga keagamaan dan tempat peribadatan dengan capaian kinerja :
- Terlaksananya sosialisasi tata cara pemberian bantuan hibah sebanyak 200 peserta
 - Terlaksananya survey calon penerima hibah

- Terlaksananya pemberian hibah sebanyak 68 penerima
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi kepada penerima hibah

Tercapai atau tidaknya kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Magetan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari terget yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Magetan selama tahun 2018 dan perkiraan target tahun 2019. Pengukuran Kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pada sub bab ini diuraikan mengenai capaian kinerja urusan sosial tahun 2013-2017. Capaian kinerja urusan sosial diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial
2. Persentase PMKS yang memperoleh program pemberdayaan KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya

3. Persentase korban bencana alam yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap
4. Persentase korban bencana alam yang memperoleh bantuan sosial selama masa tanggap darurat
5. Jumlah sarana peribadatan yang ditingkatkan
6. Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Selanjutnya capaian kinerja urusan sosial tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

1. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial adalah indikator yang menunjukkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Magetan.

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Magetan s/d Tahun 2018 Kabupaten Magetan

Nama SKPD :Dinas Sosial Kabupaten Magetan

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluarah kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.02.1.06.01.24	Program Pelayanan Penduduk Miskin	Prosentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan sunatan masal	180 anak	0	180 anak	180 anak	100	180 anak	360 anak	100
1.02.1.06.01.24.04	Pelayanan Sunatan Masal	Jumlah keluarga miskin yang mendapat sunatan masal	180 anak	0	180 anak	180 anak	100	180 anak	360 anak	100
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase ketersediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	60 bulan	100
1.06.1.06.01.01.20	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ketersediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	60 bulan	100
1.06.1.06.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur								
1.06.1.06.01.02.11	Pengadaan komputer/laptop	Jumlah sarana dan prasarana kerja bagi pegawai meningkat	1 unit	0	1 unit	1 unit	100	1 unit	2 unit	100
1.06.1.06.01	Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah gedung yang	2 unit	4 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	10 unit	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluarah kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
.02.22	gedung kantor	dipelihara								
1.06.1.06.01 .02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	7 unit	14 unit	7 unit	100	100	7 unit	35 unit	100
1.06.1.06.01 .02.31	Pemeliharaan rutin/berkala Taman Makam Pahlawan	Jumlah pemeliharaan TMP Yudonegoro	12 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	60 bulan	100
1.06.1.06.0 1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase aparatur yang mengikuti bimtek/diklat teknis fungsional							50 orang	
1.06.1.06.01 .05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah PNS yang mengikuti diklat formal	10 orang	20 orang	10 orang	10 orang	100	10 orang	50 orang	100
1.06.1.06.0 1.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase penyelesain laporan capaian kinerja dan keuangan							100%	
1.06.1.06.01 .06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dokumen	16 dokumen	8 dokumen	8 dokumen	100	8 dokumen	40 dokumen	100
1.06.1.06.0 1.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Cakupan bantuan keluarga miskin								
1.06.1.06.01 .15.04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sembako	1.180 KK	960 KK	1.180 KK	1.180 KK		1.180 KK	4.500 KK	100
1.06.1.06.01 .15.08	Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan	Jumlah bantuan kepada fakir miskin di sekitar	600 KK	600 KK	600 KK	600 KK	100	600 KK	3.000 paket	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluarah kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
	dan kesetiakawanan sosial	makam leluhur dan monumen Soco								
1.06.1.06.01.15.10	Pemberdayaan Fakir Miskin	Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan KUBE	0	30 kube	15 kube	15 kube	100	0	60 Kube	80
1.06.1.06.01.15.11	Pemberdayaan Program Keluarga Harapan	Jumlah pendamping PKH yang kinerjanya meningkat	92 orang	160 orang	76 orang	76 orang	100	92 orang	328 orang	100
1.06.1.06.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase PMKS yang mendapat bantuan								
1.06.1.06.01.16.02	Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi korban eksploitasi perdagangan perempuan dan anak	Jumlah klien korban KDRT yang mendapat pelayanan perlindungan sosial dan hukum	100 orang	200 orang	100 orang	100 orang	100	100 orang	500 orang	100
1.06.1.06.01.16.03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah peserta konseling dan kampanye sosial bagi PMKS	100 orang	200 orang	100 orang	100 orang	100	100 orang	500 orang	100
1.06.1.06.01.16.10	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah korban bencana alam yang mendapat bantuan	600 KK	1.200 KK	600 KK	600 KK	100	600 KK	3.000 KK	100
1.06.1.06.01.17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Cakupan anak terlantar yang tertangani								
1.06.1.06.01.17.02	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapat pelayanan	70 klien	140 klien	70 klien	70 klien	100	700 klien	350 klien	100
1.06.1.06.01.18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma	Prosentase penyandang cacat mampu latih yang tertangani								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluarah kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1.06.1.06.01.18.03	Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat mampu latih yang mendapat pelatihan ketrampilan	414 klien	828 klien	414 klien	414 klien	100	2.070 klien	2.070 klien	100
1.06.1.06.01.19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang tertangani								
1.06.1.06.01.19.08	Pendampingan operasional bantuan langsung tunai untuk lanjut sosial	Jumlah laporan calon penerima ASLUT	4 laporan	8 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	20 laporan	100
1.06.1.06.01.20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapiana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Prosentase Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani								
1.06.1.06.01.20.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang tertangani	44 klien	88 klien	44 klien	44 klien	100	44 klien	220 klien	100
1.06.1.06.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase PSKS yang mendapat bimbingan								
1.06.1.06.01.21.02	Peningkatan Jejaring Kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah pelaksanaan ekspose hasil kegiatan	1 kali	2 kali	1 kali	1 kali	100	5 kali	5 kali	100
1.06.1.06.01.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah PSM dan TKSK yang mendapat bimtek	252 orang	504 orang	252 orang	252 orang	100	252 orang	1260 orang	100
1.06.1.06.01.21.04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Jumlah Karang taruna dan Karang wreda yang mendapat bintek	15 KT/KW	30 KT/KW	15 KT/KW	15 KT/KW	100	15 KT/KW	75 KT/KW	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluarah kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
4.06.1.06.01.24	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Skor IKM								
4.06.1.06.01.24.03	Survey Indek Kepuasan Masyarakat	Terpantaunya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	1 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	4 dokumen	100
4.06.1.06.01.50	Program Pembinaan Mental Spiritual	Prosentase sarana peribadatan yang ditingkatkan								
4.06.1.06.01.50.03	Peningkatan kualitas pelayanan hibah kepada lembaga keagamaan dan tempat peribadatan	Jumlah lembaga keagamaan dan tempat ibadah yang mendapat bantuan	200 lembaga		200 lembaga	66 lembaga	34 %	200 lembaga	266 lembaga	67

TABEL
PERKEMBANGAN PERSENTASE PMKS YANG MEMPEROLEH BANTUAN SOSIAL
PERIODE TAHUN 2013-2017

No	Indikator	Baseline (2013)	Capaian Kinerja Tahun				Target Akhir RPJMD (2018)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD
			2014	2015	2016	2017		
1	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	2,85	10,04	12,19	18,99	18	80% (SPM)	22,50

Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial selama periode 2013-2017 cenderung meningkat dari 2,85% di tahun 2013 hingga 18% di tahun 2017. Peningkatan capaian kinerja yang sangat signifikan ini antara lain didukung oleh keberhasilan berbagai terobosan yang dilaksanakan dengan mengajukan permohonan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terutama melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Assistensi Sosial untuk Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Asistensi Sosial Untuk Orang Dengan Kecacatan Berat (ASODKB). Sedangkan bantuan sosial yang berasal dari APBD Kabupaten Magetan adalah bantuan sosial untuk korban KDRT, Disabilitas Intelektual, Korban Pasung/Eks Psykotik dan bantuan sosial untuk anak putus sekolah yang mendapat pelatihan ketrampilan di Yayasan Dharmais.

Sampai dengan akhir tahun 2017, capaian PMKS yang mendapat bantuan sosial sudah maksimal karena intervensi Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sangat konsisten dalam menangani PMKS terutama fakir miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang setiap tahun jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) meningkat dengan pesat menjadi 15.754 Keluarga Penerima Manfaat. Akan tetapi masih belum bisa memenuhi SPM bidang sosial yang seharusnya 80% pada tahun 2015.

2. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima program pemberdayaan KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya

Persentase PMKS Yang Menerima Program Pemberdayaan KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenisnya adalah indikator yang menunjukkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menerima program pemberdayaan KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Magetan.

TABEL IV.2
PERKEMBANGAN PERSENTASE PMKS YANG MENERIMA PROGRAM PEMBERDAYAAN
KUBE ATAU KELOMPOK SOSIAL EKONOMI SEJENISNYA
PERIODE TAHUN 2013-2017

No	Indikator	Baseline (2013)	Capaian Kinerja Tahun				Target Akhir RPJMD (2018) (SPM)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD
			2014	2015	2016	2017		
1	Persentase PMKS Yang Menerima Program Pemberdayaan KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenisnya	3,25	1,07	1,20	0,81	0,60	80% (SPM)	0,75%

Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang Menerima Program Pemberdayaan KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenisnya selama periode 2013-2017 cenderung turun dari 3,25% di tahun 2013 hingga 0,60% di tahun 2017. Penurunan capaian kinerja yang sangat signifikan ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan APBD Kabupaten Magetan sedangkan jumlah PMKS terus mengalami peningkatan. Mengingat anggaran yang tersedia sangat terbatas maka Pemerintah Kabupaten Magetan mengupayakan bantuan dari Kementerian Sosial RI melalui bantuan untuk KUBE Fakir Miskin Perkotaan maupun Pedesaan.

Sampai dengan akhir tahun 2017, capaian PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenisnya adalah 0,60% dan sangat kurang dari target yang telah ditetapkan yaitu 4,57%. Dan belum bisa memenuhi SPM bidang sosial yang seharusnya sebesar 80%.

3. Prosentase korban bencana skala kabupaten yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.

Di Kabupaten Magetan periode tahun 2013-2017 tidak pernah terjadi masa tanggap darurat sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL IV.5
PROSENTASE KORBAN BENCANA ALAM YANG MENERIMA BANTUAN SOSIAL
SELAMA MASA TANGGAP DARURAT
PERIODE TAHUN 2013-2017

No	Indikator	Baseline (2013)	Capaian Kinerja Tahun				Target Akhir RPJMD (2018)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD
			2014	2015	2016	2017		
1	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	0	0	0	0	0	0	
2	Persentase Korban Bencana Alam Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	0	0	0	0	0	80%	

4. Prosentase korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

Di Kabupaten Magetan periode tahun 2013-2017 tidak pernah terjadi masa tanggap darurat sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL IV.6
PROSENTASE KORBAN BENCANA ALAM YANG DIEVAKUASI MENGGUNAKAN SARANA PRASARANA TANGGAP DARURAT LENGKAP
PERIODE TAHUN 2013-2017

No	Indikator	Baseline (2013)	Capaian Kinerja Tahun				Target Akhir RPJMD (2018)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD
			2014	2015	2016	2017		
1	Jumlah Korban Bencana Alam Yang Dievakuasi Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	0	0	0	0	0	0	
2	Persentase Korban Bencana Alam Yang Dievakuasi Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	0	0	0	0	0	80%	

5. Prosentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

Perkembangan prosentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial periode tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

TABEL IV.7
PROSENTASE PENYANDANG CACAT FISIK DAN MENTAL SERTA LANJUT USIA TIDAK
POTENSIAL YANG TELAH MENERIMA JAMINAN SOSIAL
PERIODE TAHUN 2013-2017

No	Indikator	Baseline (2013)	Capaian Kinerja Tahun				Target Akhir RPJMD (2018)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD
			2014	2015	2016	2017		
1	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (SPM)	-	5,03	5,03	64	60	40% (SPM)	150%

6. Jumlah sarana peribadatan yang ditingkatkan (diisi dinas sosial)

Untuk mencapai Misi Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat maka salah satu sasaran adalah meningkatnya kualitas sarana peribadatan dan jumlah kegiatan keagamaan.

Perkembangan sarana peribadatan yang ditingkatkan periode tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut:

TABEL IV.7
JUMLAH SARANA PERIBADATAN YANG DITINGKATKAN
PERIODE TAHUN 2013-2017

No	Indikator	Baseline (2013)	Capaian Kinerja Tahun				Target Akhir RPJMD (2018)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD
			2014	2015	2016	2017		
1	Jumlah sarana peribadatan yang ditingkatkan	641	512	216	57	66	2.041	1.492 (73%)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan berdasarkan hasil analisis standar kebutuhan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Magetan serta sertanormadan standar pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan perencanaan pembangunan.

Hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Magetan sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Magetan
Provinsi Jawa Timur

NO.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK/In dikator lain	Target Renstra Perangkat Daerah				Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (n-2)	Tahun 2018 (n-1)	Tahun 2019 (n)	Tahun 2020 (n+1)	Tahun 2017 (n-2)	Tahun 2018 (n-1)	Tahun 2019 (n)	Tahun 2020 (n+1)	
1	2	3	4									
1.	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	80		5,32	5,87			18				
2.	Persentase PMKS Yang Menerima Program Pemberdayaan KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenisnya	80		0,60				0,60				
3.	Persentase Korban Bencana Alam Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	80		100	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase Korban Bencana Alam Yang Dievakuasi Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	80		100	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (SPM)	40		60	60	60	60	60	60	60	60	

NO.	Indikator	SPM/ stan dar nasiona l	IKK/In dikator lain	Target Renstra Perangkat Daerah				Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (n-2)	Tahun 2018 (n-1)	Tahun 2019 (n)	Tahun 2020 (n+1)	Tahun 2017 (n-2)	Tahun 2018 (n-1)	Tahun 2019 (n)	Tahun 2020 (n+1)	
6.	Jumlah sarana peribadatan yang ditingkatkan			200	200	200	200	66	200	200	200	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana SKD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plan*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang yang dapat tertampung dalam APBD selama ini dikarenakan keterbatasan dana dari pemerintah.

Untuk dapat mendukung kondisi sesuai yang diinginkan, kemampuan teknis bidang kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang benar-benar dibutuhkan dan bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti yang selama ini terjadi.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan perencanaan program/kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Magetan sehingga aparatur semakin profesional di bidang tugasnya masing-masing. Untuk itu kualitas aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Dalam menyusun dokumen perencanaan beberapa isu-isu strategis yang menjadi bahan pertimbangan adalah sebagai berikut :

a. Isu internal

1) Tugas Pokok dan Fungsi

- Inovasi-inovasi dibidang kesejahteraan sosial dengan melibatkan masyarakat/ fasilitas/ pengusaha/ pekerja untuk mengantisipasi

perubahan dan dinamika yang terjadi dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan serta tuntutan masyarakat.

- Penelitian-penelitian dibidang lintas sektor yang memberikan dampak besar bagi pembangunan Kabupaten Magetan dan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, koordinasi dan dinamika perubahan.
- Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi.
- Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses kesejahteraan sosial masyarakat dengan melibatkan masyarakat / fasilitasi untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi upaya pelayanan kesejahteraan sosial.
- Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan hasil penelitian lintas sektor untuk meningkatkan kualitas perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi.
- Selalu cermat dan tanggap atas segala kondisi dan situasi yang terjadi didalam perkembangan dan keinginan masyarakat, sehingga apa yang diinginkan semua pihak dapat diwujudkan dengan baik dan terencana.

2) Sumber Daya Aparatur

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

3) Sarana dan Prasarana

- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahab dan optimalisasi pemeliharaan.

4) Keterbatasan Kemampuan Anggaran

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tidak saja dialami oleh Pemerintah Pusat namun juga dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah,

sehingga Kabupaten Magetan menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarnya. Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

b. Isu Eksternal

1) Globalisasi

Seiring kemajuan zaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang. Kemajuan di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia virtual.

2) Peraturan Perundang-undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good governance dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, transparan dan akuntabel. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah dan masyarakat serta penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya penyelenggaraan pembangunan dapat berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Magetan dalam peningkatan kualitas pelayanan di bidang kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
- 2) Perubahan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial sehingga mempengaruhi penyusunan Program dan Kegiatan;
- 3) Kemampuan dan jumlah sumber daya manusia yang terbatas;

- 4) Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
- 5) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan program/kegiatan;
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi dikaitkan dengan dokumen perencanaan;
- 7) Ketidaksesuaian indikator-indikator yang ada didalam dokumen perencanaan sehingga mempengaruhi proses pelaksanaan dan evaluasi.

Ketidaksesuaian dokumen perencanaan awal sangat berpengaruh terhadap hasil-hasil dokumen perencanaan pembangunan sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala Daerah didalam Visi dan Misi Kepala Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Review terhadap rancangan awal RKPD ini dilakukan untuk membandingkan antar rancangan awal RKPD dengan kebutuhan SKPD, terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan yang tidak berhasil atau kurang maksimal, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih besar atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil yang optimal.

Review juga dilakukan terhadap program/kegiatan yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD atau ketidak sesuaian program/kegiatan maupun besarnya.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPDTahun 2019
Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur

Nama SKPD :Dinas Sosial Kabupaten Magetan

NO.	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kab. Magetan	Jumlah anak dari keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan sunatan masal		140.000.000	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kab. Magetan	Jumlah anak dari keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan sunatan masal		150.000.000	
	Pelayanan Sunatan Masal	Kab. Magetan	Jumlah peserta sunatan masal	180 anak	140.000.000	Pelayanan Sunatan Masal	Kab. Magetan	Jumlah peserta sunatan masal	180 anak	150.000.000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Magetan	Skor Kepuasan Masyarakat	75 skor	340.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Magetan	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran		590.000.000	
	Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Magetan	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	100%	450.000.000	Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	Kab. Magetan	Ketersediaan jasa administrasi perkantoran	12 bulan	450.000.000	
	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Kab. Magetan	Jumlah ketersediaan pelayanan perjalanan dinas	12 bulan	120.000.000	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Kab. Magetan	Jumlah ketersediaan pelayanan perjalanan dinas	12 bulan	120.000.000	
	Survey Kepuasan Masyarakat	Kab. Magetan	Jumlah ketersediaan dokumen IKM	1 dokumen	20.000.000	Survey Kepuasan Masyarakat	Kab. Magetan	Jumlah ketersediaan dokumen IKM	1 dokumen	20.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kab. Magetan	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	560.000.000	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Kab. Magetan			315.000.000	
						Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Magetan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia untuk penanganan bencana dan hasil razia	3 unit	75.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Magetan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	6 unit R4, 10 R2	80.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Magetan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	6 unit R4, 10 R2	200.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan kantor	Kab. Magetan	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	35 unit (5 meja dan 30 kursi)	30.000.000	Pengadaan Perlengkapan kantor	Kab. Magetan	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	35 unit (5 meja dan 30 kursi)	15.000.000	
	Rehabilitasi / Pemeliharaan gedung kantor	Kab. Magetan	Jumlah gedung kantor yang direhab	4 unit (gudang buffer stock dan rumah singgah / shelter, gedung karang taruna dan gedung kantor)	450.000.000	Rehabilitasi / Pemeliharaan gedung kantor	Kab. Magetan	Jumlah gedung kantor yang direhab	4 unit (gudang buffer stock dan rumah singgah / shelter, gedung karang taruna dan gedung kantor)	25.000.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Magetan	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi	75%	100.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Magetan	Prosentase aparatur yang memiliki kompetensi	75%	25.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Magetan	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	10.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Magetan	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	10 orang	25.000.000	
	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Prosentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu		25.000.000	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Prosentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu Prosentase penyelesaian laporan capaian kinerja dan keuangan		100.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan keuangan yang tersusun	- 10 dokumen	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Magetan	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan keuangan yang tersusun	- 10 dokumen - Monev 12 kali di 18 kecamatan - Sosialisasi program kesos	100.000.000	
	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Kab. Magetan	Prosentase keluarga fakir miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat keberfungsian sosialnya		250.000.000	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Kab. Magetan	Prosentase keluarga fakir miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat keberfungsian sosialnya		1.000.000.000	
						Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	Kab. Magetan	Jumlah anggota kube fakmis yang mendapat pelatihan ketrampilan	100 KK	300.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Kab. Magetan	Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sembako dan mendapat bantuan modal usaha	50 KK	150.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Kab. Magetan	Jumlah keluarga miskin yang mendapat bantuan sembako dan mendapat bantuan modal usaha	50 KK	400.000.000	
						Pendataan PMKS	Kab. Magetan	Pendataan LU dan disabilitas	1 kegiatan	200.000.000	
	Pemberdayaan Fakir Miskin	Kab. Magetan	Jumlah Dokumen Pemuthakiran data terpadu kemiskinan	1 dokumen	100.000.000	Pemberdayaan Fakir Miskin	Kab. Magetan	Pemuthakiran data kemiskinan	1 dokumen	100.000.000	
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Kab. Magetan	Prosentase PMKS penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan sosialnya		325.000.000	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Kab. Magetan	Prosentase PMKS penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan sosialnya		1.050.000.000	
	Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitas, perdagangan perempuan dan anak	Kab. Magetan	Jumlah peserta sosialisasi, bimbingan sosial, pengiriman ke panti sosial dan penerima bantuan sosial	150 orang	25.000.000	Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban eksploitas, perdagangan perempuan dan anak	Kab. Magetan	Jumlah peserta sosialisasi, bimbingan sosial, pengiriman ke panti sosial dan penerima bantuan sosial , Jumlah korban KDRT yang mendapat pendampingan	130 orang	100.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pelaksanaan KIE dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMS)	Kab. Magetan	Jumlah peserta sosialisasi, bimbingan sosial, pengiriman ke panti sosial dan penerima bantuan sosial	100 orang	25.000.000	Pelaksanaan KIE dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMS)	Kab. Magetan	Jumlah penyandang HIV/AIDS dan orban penyalahgunaan NAPZA yang mendapat pendampingan	320 orang	200.000.000	
	Pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi korban bencana	Kab. Magetan	Jumlah klien yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar maupun pendampingan psikososial	70 orang	50.000.000	Pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi korban bencana	Kab. Magetan	Jumlah klien yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar maupun pendampingan psikososial	100 orang	150.000.000	
	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	Kab. Magetan	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja	100 klien (anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal)	75.000.000	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	Kab. Magetan	Jumlah peserta pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja serta menerima bantuan modal usaha	100 klien	300.000.000	
	Penanganan Lanjut Usia Terlantar	Kab. magetan	Jumlah klien Lanjut Usia terlantar yang ditangani	350 klien	75.000.000	Penanganan Lanjut Usia Terlantar	Kab. magetan	Jumlah klien Lanjut Usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar	500 klien	200.000.000	
	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Kab. Magetan	Jumlah klien yang mendapatkan pelayanan	60 klien	75.000.000	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Kab. Magetan	Jumlah klien yang mendapatkan pelayanan	100 klien	100.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Kab. Magetan	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		400.000.000	Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Kab. Magetan	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih		900.000.000	
	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Kab. Magetan	Jumlah even yang diikuti	2 kegiatan	50.000.000	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Kab. Magetan	Jumlah kegiatan ekspose PSKS	1 kegiatan	100.000.000	
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Kab. Magetan	Jumlah PSM yang mendapat pelatihan dan jumlah TKSk yang melakukan pendampingan	90 orang	75.000.000	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Kab. Magetan	Jumlah PSM yang mendapat pelatihan dan jumlah TKSk yang melakukan pendampingan	72 orng PSM, 18 TKSK	150.000.000	
	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Kab. Magetan	Jumlah peserta peltihan dan bimbingan	50 lembaga	50.000.000	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Kab. Magetan	Jumlah Karang Taruna dan Karang Wredha yang mendapat bmbingan dan pelatihan	110 lembaga	100.000.000	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Kab. Magetan	Jumlah ketersediaan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	12 bulan	100.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Kab. Magetan	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan (termasuk rehab berat persemayaman dan tugu daftar nama pahlawan)	12 bulan	300.000.000	
	Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Kab. Magetan	Jumlah keluarga miskin di sekitar makam leluhur yang mendapat penanaman nilai-nilai kepahlawanan	650 orang (600 orang mendapat sembako dan 50 orang	125.000.000	Penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial	Kab. Magetan	Jumlah keluarga miskin di sekitar makam leluhur yang mendapat penanaman nilai-nilai kepahlawanan	650 orang (600 orang mendapat sembako dan 50 orang	250.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	
				mengikuti sarasehan)					mengikuti sarasehan)		
	Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat				250.000.000	Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat				550.000.000	
	Kesiapsiagaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat	Kab. Magetan	Jumlah kegiatan penanggulangan bencana berbasis masyarakat	1 KSB	150.000.000	Kesiapsiagaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat	Kab. Magetan	Pembentukan Kampung Siaga Bencana, Tagana Go T School, Tagana Teman Masyarakat, Pendidikan dasar bagi tagana Muda	1 KSB, 2 kegiatan Tagana Go To school, 1 TTM, 50 peserta Dikdas Tagana Muda	300.000.000	
	Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana	Kab. Magetan	Jumlah eks korban bencana yang tertangani	200 KK	100.000.000	Pemulihan dan perlindungan sosial eks korban bencana	Kab. Magetan	Jumlah eks korban bencana yang mendapat bantuan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial	200 KK	250.000.000	
	Program Bantuan dan Perlindungan Sosial				525.000.000	Program Bantuan dan Perlindungan Sosial				750.000.000	
	Pendampingan operasional Program Keluarga Harapan	Kab. Magetan	Jumlah wilayah yang dapat melaksanakan penyaluran PKH sesuai ketentuan yang berlaku	18 kec dan 91 orang	250.000.000	Pendampingan operasional Program Keluarga Harapan	Kab. Magetan	Jumlah wilayah yang dapat melaksanakan penyaluran PKH sesuai ketentuan yang berlaku dan pendampingan PKH	18 kec dan 91 orang	300.000.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target	Pagu indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	
								yang mendapat bantuan operasional agar dapat melaksanakan tugas sesuai ketentuan			
	Pendampingan operasional Bantuan Sosial Pangan	Kab. Magetan	Jumlah wilayah yang dapat melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial Pangan sesuai ketentuan yang berlaku	235 desa/kel	200.000.000	Pendampingan operasional Bantuan Sosial Pangan	Kab. Magetan	Jumlah wilayah yang dapat melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial Pangan sesuai ketentuan yang berlaku	235 desa/kel	300.000.000	
	Penanganan dan perlindungan sosial bagi Orang Terlantar	Kab. Magetan	Jumlah Orang Terlantar yang terlayani	60 klien	75.000.000	Penanganan dan perlindungan sosial bagi Orang Terlantar	Kab. Magetan	Jumlah Orang Terlantar yang terlayani	60 klien	150.000.000	
	Program Pembinaan Mental Spiritual	Kab. Magetan			80.000.000	Program Pembinaan Mental Spiritual	Kab. Magetan			150.000.000	
	Peningkatan Kualitas Pelayan Hibah Kepada Lembaga Keagamaan dan Peribadatan	Kab. Magetan	Jumlah calon penerima hibah	100 lembaga	80.000.000	Peningkatan Kualitas Pelayan Hibah Kepada Lembaga Keagamaan dan Peribadatan	Kab. Magetan	Tersalurannya bantuan hibah untuk lembaga keagamaan maupun sosial	250 lembaga	150.000.000	
JUMLAH					2.905.000.000					5.580.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam tahun 2019 ini terdapat program/kegiatan yang diusulkan kelompok masyarakat melalui Kecamatan yang langsung ditujukan ke Dinas Kabupaten Magetan melalui Musrenbang, sehingga Renja Dinas Sosial Kabupaten Magetan tahun 2019 merupakan perpaduan dari program/kegiatan yang sudah direncanakan 2018 dengan penyesuaian rincian sub kegiatan beserta targetnya dan hasil Musrenbang Kecamatan.

Tabel T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2019
Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur

Nama SKPD: Dinas Sosial Kabupaten Magetan

Nomor	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DANKEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 agenda pembangunan nasional antara lain adalah Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya transparansidan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, antara lain dilaksanakan melalui Penerapan *e-governmen* tuntut mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana,efisien, transparan dan terintegrasi.

Agenda pembangunan nasional selanjutnya adalah meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik, dengan sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik, dan meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah, antara lain dilaksanakan dengan membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik.

Agenda pembangunan nasional lainnya adalah peningkatan investasi dengan sasaran meningkatnya investasi PMA dan PMDN melalui menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik ditingkat pusat maupun daerah, dilaksanakan antara lain dengan Pendirian Forum Investasi, yang beranggotakan lintas kementerian dan lintas pemangku kepentingan yang secara

rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi dan mencari solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor.

Agenda lain adalah peningkatan kapasitas inovasi dan teknologi, dengan sasaran :

1. meningkatkan hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mendukung daya saing sektor produksi barang dan jasa;
2. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam;
3. serta penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global;
4. terbangunnya 100 *TechnoPark* di kabupaten/kota dan *SciencePark* di setiap provinsi.

Untuk melaksanakan agenda prioritas pembangunan nasional yang telah digariskan, diperlukan komitmen dan dukungan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Magetan bertekad untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan partisipasi publik yang sebanyak-banyaknya melalui penyelenggaraan musrenbang serta penerapan e-government yang berkualitas, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan secara online.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan yang substansinya merupakan penjabaran visi, misi, dan arah pembangunan daerah Kabupaten Magetan di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Penyusunan dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2018 harus sesuai dengan Visi Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah **"Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Yang Berkualitas"**.

Dalam merealisasikan visi tersebut diatas maka Dinas Sosial Kabupaten Magetan memiliki misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui upaya-upaya pemberian bantuan dan pemberdayaan PMKS dan PSKS
- 2) Meningkatkan bantuan dan pemberdayaan sosial fakir miskin dengan menumbuhkembangkan kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan yang mandiri dan berkualitas.
- 3) Terwujudnya kesejahteraan bagi penyandang disabilitas, keterlantaran dan tuna sosial sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar.

Dari Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Magetan diatas selanjutnya dijabarkan kedalam Program yang yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013 – 2018 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.
6. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
7. Program Pembinaan Anak Terlantar.
8. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.
9. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Eks PSK, narkoba da penyakit sosial lainnya).
10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
11. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
12. Program Bantuan dan Perlindungan Sosial
13. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
14. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
15. Program Pembinaan Mental Spiritual

3.2 Tujuan dan sasaran RenjaSKPD

Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu strategis dan penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

I. Tujuan

1. Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia daam pengentasan kemiskinan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan terjaminnya perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan dan kurang beruntung.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan sosial, rehabilitasi dan perlindungan sosial melalui pemberdayaan KUBE dan bantuan stimulan UEP.
3. Meningkatnya peran PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), TKSK, PSM, Karang Taruna dan Organisasi Sosial lainnya terhadap pelayanan sosial secara berkelanjutan.
4. Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan masyarakat dalam rangka mencegah dan tertanganinya permasalahan sosial.
5. Meningkatnya kualitas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
6. Meningkatnya kualitas rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.
7. Meningkatnya kualitas rehabilitasi sosial dasar penyandang lanjut usia terlantar di luar panti.
8. Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota

II. Sasaran

1. Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Terwujudnya peran PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) dalam pengentasan .
3. Terwujudnya peran serta PMKS dalam kegiatan pelayanan sosial secara berkelanjutan.

4. Terwujudnya ketahanan sosial secara individu, keluarga dan masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial.

Target sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2019:

Tabel III.1
Target Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Magetan
Tahun 2019

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Anak terlantar di luar panti	Jumlah penyandang anak terlantar di luar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah penyandang lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah penyandang tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat	Jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat	100%

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting

- a. Untuk keberhasilan pencapaian target Renja, seluruh unit yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Magetan wajib segera menindaklanjuti dengan penyusunan time schedule pelaksanaan kegiatan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu;
- b. Untuk menjamin sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan program-program pembangunan daerah, agar koordinasi intern dan lintas SKPD dilakukan secara intensif, sehingga diperoleh hasil maksimal dari pelaksanaan program/kegiatan.
- c. Dalam melaksanakan program/kegiatan agar memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi;
- d. Apabila pagu anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan perencanaan dikarenakan adanya penyesuaian dengan kekuatan anggaran, agar segera dilakukan penyesuaian terhadap target-target kinerja.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

- a. Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2019 ini merupakan pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Magetan agar dalam menyusun rencana program/kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Magetan Tahun 2019 digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun 2019;
- c. Untuk memastikan target-target di Renja tercapai, agar dilakukan evaluasi secara berkala sehingga dapat segera diketahui pelaksanaan program/kegiatan yang menemui kendala/masalah agar segera dapat diambil langkah-langkah antisipasi.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Renja Dinas Sosial Kabupaten Magetan digunakan sebagai dasar dan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja masing-masing unit kerja/aparatur Dinas Sosial Kabupaten Magetan. Oleh karena itu segera setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran disahkan agar ditindaklanjuti dengan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai mengacu kepada indikator kinerja serta target yang tercantum dalam Renja serta ditindaklanjuti juga dengan perjanjian kinerja secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Magetan sampai dengan pejabat eselon IV.

Magetan, 16 Juli 2019

Plt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Magetan



SUCIPTO, SH. M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19660714 199403 1009